

PERAN MODAL SOSIAL DAN BUDAYA DALAM MEMINIMALIKAN KEKERASAN SIMBOLIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANDUNG

Dadi Suhanda¹, Tukuh Takdir Sembada², Manda Firtza Rahman³

^{1,2} Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

³ Kementerian pendidikan tinggi sains dan teknologi republik indonesia, Jl. Buah Batu No.212, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265

¹ dadsuhanda@gmail.com, ²tukuh.takdir.s@gmail.com, ³ mandafirtzarahman@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan simbolik masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Pertama. Kekerasan ini beroperasi di bawah ambang kesadaran (nirsadar) dan bersifat laten, menjadikannya tidak kasat mata dan jarang muncul sebagai wacana publik, serta sebagai fakta yang diperbincangkan secara terbuka. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari kekerasan simbolik adalah kecenderungannya untuk dinormalisasi. Kekerasan simbolik seringkali diterima oleh pihak yang menjadi sasaran sebagai bentuk hal yang wajar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran modal sosial dan budaya sebagai upaya meminimalisir kekerasan simbolik pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung dan mengidentifikasi praktik-praktik transformatif yang mengubah modal sosial dan budaya dari alat dominasi menjadi sumber kesetaraan. Dengan pendekatan kualitatif serta desain etnografi, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara mendalam di sekolah-sekolah untuk mengungkap praktik kekerasan simbolik dalam konteks sosial-budaya spesifik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian mengungkap tiga manifestasi utama, yaitu: ejekan berbasis penampilan dan pemberian label negatif antarsiswa, perbedaan perlakuan guru berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi siswa, dan bias kelas dominan dalam kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Temuan kunci menunjukkan pemanfaatan transformatif kedua modal ini mampu menciptakan lingkungan sekolah yang egaliter. Implikasi kebijakan menekankan perlunya: kurikulum berbasis komunitas yang mengakomodasi keragaman siswa, pelatihan kesadaran bagi guru, dan institusionalisasi program antibullying berbasis modal sosial dan budaya.

Kata kunci: Kekerasan Simbolik, Modal Sosial, Modal Budaya.

ABSTRACT

Symbolic violence remains a challenge in education, particularly in junior high schools. This violence operates below the threshold of consciousness (unconscious) and is latent, making it invisible and rarely appearing as public discourse or openly discussed facts. One of the most worrying aspects of symbolic violence is its tendency to be normalized. Symbolic violence is often accepted by the target as a normal thing. The main objective of this study is to analyze the role of social and cultural capital as an effort to minimize symbolic violence in junior high schools in Bandung Regency and to identify transformative practices that change social and cultural capital from a tool of domination to a source of equality. Through a qualitative approach with an ethnographic design, data was collected through participant observation, focus group discussions (FGD), and in-depth interviews in schools to reveal practices of symbolic violence in the specific socio-cultural context of junior high schools in Bandung Regency. The results of the study reveal three main manifestations, namely: appearance-based teasing and negative labeling among students, differences in teacher treatment based on students' socio-economic backgrounds, and dominant class bias in the hidden curriculum. Key findings show that the transformative use of these two types of capital can create an egalitarian school environment. Policy implications emphasize the need for: a community-based curriculum that accommodates student diversity, awareness training for teachers, and the institutionalization of anti-bullying programs based on social and cultural capital.

Keywords: Symbolic violence, social capital, cultural capital

PENDAHULUAN

Pendidikan telah menjadi pilar fundamental yang tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga menjalankan ilmu pengetahuan serta keterampilan. Melalui pendidikan, individu memperoleh nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kemajuan diri dan kolektif hingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, lingkungan pendidikan tidak selalu terbebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan dalam pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti perundungan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, bahkan simbolik (Wibowo & Chasif Ascha, 2023). Dalam perspektif pendidikan, kekerasan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena esensi dari proses pendidikan adalah upaya berkelanjutan untuk memanusiakan manusia (Krisbiyantoro & Lestari, 2008).

Di antara berbagai bentuk kekerasan, kekerasan simbolik lebih menonjol karena sifatnya yang halus dan seringkali tidak disadari oleh pelaku maupun korbannya. Kekerasan simbolik dalam lingkungan pendidikan merupakan fenomena laten yang beroperasi secara tersembunyi melalui mekanisme kultural dan relasi kuasa, seringkali tidak disadari baik oleh pelaku maupun korbannya di mana satu pihak memandang dirinya lebih superior, baik dalam segi moral, etis, agama, jenis kelamin, maupun usia. Sekolah, khususnya dalam relasi guru dan peserta didik, menjadi lahan subur bagi kekerasan simbolik karena kekerasan di sekolah bersumber dari pola yang tidak setara (Ulfah, 2013).

Mekanismenya meliputi eufemisasi dan sensorisasi, yang dapat berupa perintah, ancaman, atau pencitraan (Selfiana et al., 2023) misalnya, ejekan berbasis penampilan dan pemberian label negatif antarsiswa, perbedaan perlakuan guru berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi siswa, dan bias kelas dominan dalam kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Kekerasan ini beroperasi di bawah ambang kesadaran (nirsadar) dan bersifat laten, menjadikannya tidak kasat mata dan jarang muncul sebagai wacana publik, apalagi sebagai fakta yang diperbincangkan secara terbuka.

Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari kekerasan simbolik adalah kecenderungannya untuk dinormalisasi. Maka dari itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Kekerasan simbolik seringkali diterima oleh pihak yang menjadi sasaran sebagai bentuk hal yang wajar dan biasa terjadi dalam hubungan antar individu. Jika kekerasan dipersepsikan sebagai sesuatu yang "normal" atau "alami" oleh mereka yang mengalaminya, maka kekerasan tersebut akan tertanam secara mendalam dalam habitus dan struktur sistem pendidikan yang mengakibatkan kekerasan ini akan terus terjadi secara turun-temurun. Normalisasi ini membuatnya sangat menantang untuk diidentifikasi, ditantang, atau bahkan dianggap sebagai masalah. Oleh karena itu, intervensi tidak hanya harus mengatasi manifestasi kekerasan simbolik yang jelas, tetapi juga menargetkan penerimaan dan naturalisasi dinamika kekuasaan yang mendasarinya. Ini membutuhkan pergeseran mendalam dalam persepsi kolektif dan habitus yang tertanam pada semua pemangku kepentingan dalam lingkungan sekolah. Karakteristik kekerasan simbolik yang tersembunyi membuat studi dan mitigasinya menjadi sangat mendesak. Jika suatu bentuk kekerasan tidak dikenali oleh pihak yang melakukan maupun yang menjadi korban, maka kekerasan tersebut tidak dapat ditangani secara efektif.

Penelitian ini mengkaji peran modal sosial dan modal budaya dalam upaya memahami dan meminimalisasi kekerasan. Modal budaya mencakup kerja sama, nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan sosial, sangat penting untuk meningkatkan mutu sekolah dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, modal budaya, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kode budaya, dan gelar pendidikan, berperan dalam penentuan kedudukan sosial individu dalam ranah pendidikan. Namun, penting untuk memahami bahwa yang termasuk modal sosial dan budaya juga dapat menjadi pedang bermata dua. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekerasan simbolik dapat berakar dari penyalahgunaan modal simbolik oleh pihak-pihak yang dominan atau yang memiliki kuasa. Kekerasan ini didukung oleh dominasi, modal, arena, dan

habitus seorang pendidik (Reresi et al., 2023). Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bandung, praktik ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi budaya lokal, bias kurikulum, dan hierarki pengetahuan yang mereproduksi ketimpangan sosial.

Kekerasan simbolik bekerja melalui proses *eufemisasi* (membuat paksaan terlihat wajar) dan *sensorisasi* (menghilangkan alternatif di luar norma dominan), sehingga korban menerimanya sebagai sesuatu yang alamiah Misalnya, seragam sekolah, meskipun dimaksudkan untuk mempromosikan kesetaraan, justru dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial dan nilai-nilai dominan (Mohulaingo et al., 2025, hlm. 1483). Seringkali, seragam sekolah dianggap sebagai simbol kesetaraan, tetapi pada kenyataannya, seragam dapat memperlebar jurang ketimpangan. Ini memaksa kita untuk merenungkan, bagaimana sebuah kebijakan yang pada dasarnya baik dapat memiliki dampak yang justru berlawanan dengan tujuannya. Di sisi lain, modal budaya menawarkan lensa kritis untuk mendekonstruksi mekanisme ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa modal sosial dan modal budaya dapat dikonversi menjadi modal simbolik yang tidak selalu bersifat jinak; penyalahgunaannya oleh aktor dominan dapat menyebabkan kekerasan simbolik.

Sebaliknya, strategi untuk meminimalisir kekerasan simbolik melibatkan penerapan positif dari modal-modal ini, seperti membangun hubungan sosial yang baik dan menanamkan nilai-nilai positif. Pendidikan yang terlalu fokus pada kecerdasan kognitif dan mengabaikan aspek lain akan kehilangan esensi humanisasinya (Sa'diyah, 2021, hlm. 80). Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan sekolah yang menekankan budaya dialogis, peningkatan kesadaran guru dan siswa, serta sikap kritis terhadap praktik-praktik yang mengandung kekerasan simbolik (Reresi et al., 2023, hlm. 165).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran modal sosial dan modal budaya sebagai upaya meminimalisir kekerasan simbolik pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung. Penelitian ini sangat substansial karena

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana interaksi antara modal sosial dan modal budaya dapat membentuk lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi praktis bagi pihak sekolah, pendidik, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan simbolik, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan demokratis.

Dengan pendekatan kualitatif serta desain etnografi, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara mendalam di sekolah-sekolah untuk mengungkap praktik kekerasan simbolik dalam konteks sosial-budaya spesifik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi simbolik, *habitus*, dan dinamika modal sosial-budaya secara holistik (Rosaliza et al., 2023) Untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam, penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis Pierre Bourdieu. Konsep-konsep inti Bourdieu, seperti *habitus*, ranah (*field*), dan berbagai bentuk modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik), menyediakan lensa yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan dan ketimpangan dalam pendidikan. Kekerasan simbolik, dalam pandangan Bourdieu, adalah bentuk kekuasaan tersembunyi yang memaksa kepatuhan tanpa disadari sebagai paksaan, melainkan diterima sebagai hal yang wajar.

Pengumpulan data dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD dan analisis data dilakukan berdasarkan model (James p. Spradley, 2006, hlm. 79-85). *Domain analysis*: mengelompokkan data mentah ke dalam kategori "bentuk kekerasan simbolik", "manifestasi modal sosial". *Taxonomic Analysis*: Menghubungkan kategori dengan subkategori (modal sosial → jaringan kolaborasi, solidaritas). *Componential Analysis*: Mengidentifikasi kontras antarkategori (perbedaan perlakuan guru antarkelas sosial). *Theme Analysis*: Menyintesis tema inti "modal budaya

sebagai alat inklusi" menggunakan lensa teori Bourdieu.

Bourdieu mendefinisikan modal budaya sebagai kompetensi kultural yang menentukan posisi sosial individu, terbagi dalam tiga bentuk: (1) terwujud (*embodied*) berupa pengetahuan dan bahasa yang diinternalisasi; (2) terobjektivasi (*objectified*) seperti buku atau karya seni; dan (3) terinstitusionalisasi (*institutionalized*) berupa gelar akademik (Bourdieu, 1986). Di sekolah, modal budaya kerap menjadi alat kekerasan simbolik ketika kurikulum mengabsahkan budaya dominan, misalnya, mengabaikan kesenian Sunda dan mendiskreditkan habitus kelompok marginal (Retnosari, 2019). Namun, modal budaya juga berpotensi menjadi instrumen resistensi jika diarahkan untuk validasi keragaman budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah adalah tempat di mana siswa mendapatkan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan secara terstruktur atau tersistematis untuk mengembangkan potensi mereka. Sehingga sistem pendidikan di sekolah dianggap sebagai penentu utama kualitas sumber daya manusia di masa depan (Mahrus, 2021). Semua ini dilakukan melalui kurikulum yang telah disusun sedemikian rupa. Sistem pendidikan sekolah negeri di Indonesia memuat beragam kebijakan. Sebuah studi mengenai kurikulum memuat dua jenis, yaitu kurikulum yang resmi dan kurikulum tersembunyi (Darmaningtyas & Subkhan, 2012, hlm. 215). Namun, sekolah cenderung terlalu fokus pada kurikulum formal yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, sehingga mengabaikan atau kurang memanfaatkan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang sebenarnya kaya akan potensi pembelajaran (Caswita, 2019, hlm. 301).

Kurikulum resmi dirancang secara formal dan ditetapkan secara resmi sebagai petunjuk dalam praktik pembelajaran. Di sisi lain, kurikulum tersembunyi menyimpan berbagai nilai, budaya, tata kelola, pengetahuan, dan ideologi yang beroperasi dalam kegiatan pembelajaran baik secara sadar maupun tidak. Kebijakan kurikulum tersembunyi selama ini tidak dikenali cara kerjanya, dalam implementasinya ternyata

memiliki pengaruh yang signifikan yang tanpa disadari mengandung bentuk-bentuk kekerasan simbolik (Retnosari, 2019, hlm. 424)

Sekolah sebagai ranah relasi pendidik dan peserta didik berinteraksi melalui berbagai bentuk modal seperti modal sosial, budaya, serta simbolik yang dapat mempengaruhi untuk mencapai tujuan dan menentukan posisi mereka dalam ranah sosial. Pendidik, dengan modal simbolik, budaya, dan sosial yang dimilikinya, memiliki kekuatan untuk mendominasi sistem dalam ranah sosial, khususnya dalam proses pembelajaran (Siswadi, 2022, hlm. 88-89) Dalam prosesnya, terjadi kekerasan simbolik ketika habitus dominan dan modal yang dimilikinya secara halus dipaksakan dan diterima sebagai hal yang wajar dalam ranah pendidikan. Hal ini tentu menunjukkan kekuatan tersembunyi yang memungkinkan kelas dominan untuk mendominasi kelas yang kurang beruntung. Hubungan antara habitus dan kekerasan simbolik bersifat rekursif (pengulangan).

Berdasarkan data kuesioner dari 30 siswa SMP di Kabupaten Bandung dan kerangka teori modal budaya Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik di lingkungan sekolah termanifestasi utamanya melalui ejekan berbasis penampilan fisik (disebutkan 76% responden), pemberian label negatif seperti "pemalas" (68%), perbedaan perlakuan guru terhadap siswa tertentu (52%), dan penghinaan dengan memanggil nama orang tua (44%). Bentuk-bentuk kekerasan ini, meski tidak melibatkan kekuatan fisik, menciptakan hierarki sosial tersembunyi yang secara sistematis meminggirkan siswa dari latar belakang marginal. Contohnya adalah proses pengajaran oleh seorang guru yang dipengaruhi oleh kebiasaan yang dimiliki, sarana pembelajaran yang cenderung mendukung kelas yang dominan, hingga pada sistem-sistem yang ada dan diimplementasikan.

Kekerasan simbolik sebagai salah satu bentuk kekerasan tidak langsung yang beroperasi melalui mekanisme kultural dan wacana, seringkali tidak disadari oleh pelaku maupun korbannya (nirsadar). Kekerasan ini menyembunyikan sifat kekerasannya sehingga tidak dikenali atau dirasakan sebagai bentuk kekerasan,

bahkan sering diterima sebagai hal yang wajar oleh pihak yang menjadi sasaran. Mekanismenya melibatkan kekuasaan yang timpang dan hegemoni, di mana satu pihak memandang dirinya lebih superior.

Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan simbolik bekerja melalui *eufemisasi* (membuat paksaan terlihat normal atau wajar) dan *sensorisasi* (menekan atau menyembunyikan alternatif, sehingga hanya pandangan dominan yang terlihat) (Mangera & Simega, 2017, hlm. 209). Ini meliputi peringatan, perintah, ancaman, dan hinaan dari guru, serta perilaku guru yang menekan peserta didik dengan perintah dan larangan tanpa memberi kelonggaran.

Strategi pemanfaat modal sosial dan modal budaya digunakan sebagai upaya untuk dekonstruksi kekerasan simbolik di SMP Kabupaten Bandung. Unsur-unsur modal sosial meliputi norma sebagai pedoman tingkah laku, jaringan sosial sebagai kelompok dengan nilai informal kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, dan kemampuan berempati adalah nilai-nilai sosial yang penting yang merupakan modal sosial yang dapat memperkuat kesatuan masyarakat.

Dalam pendidikan, pengembangan modal sosial berarti meningkatkan akses dan mutu pendidikan, mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada nilai sosial, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Modal sosial dapat berfungsi sebagai fondasi untuk resistensi kolektif terhadap kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik seringkali berkembang subur dengan membuat korban merasa terisolasi, pengalaman mereka dinormalisasi, dan suara mereka tidak didengar. Namun, ketika "hubungan sosial yang baik" dan "jaringan sosial" yang kuat dipupuk, individu cenderung tidak mengalami isolasi ini.

Kepercayaan kolektif, pemahaman bersama, dan dukungan timbal balik yang melekat dalam modal sosial yang kuat dapat memberdayakan baik korban maupun saksi untuk mengenali kekerasan simbolik sebagaimana adanya dan untuk bertindak secara kolektif melawannya. Hal ini mengubah penerimaan pasif individu menjadi agensi dan resistensi aktif. Oleh karena itu, memupuk modal sosial di

sekolah bukan hanya tentang meningkatkan kualitas akademik atau manajemen sekolah, melainkan secara lebih mendalam, tentang membangun kapasitas kolektif untuk melawan, mendenormalisasi, dan pada akhirnya mengubah struktur kekuasaan yang menindas yang tertanam dalam ranah pendidikan.

Sementara itu, modal budaya juga memiliki peran yang tidak kalah penting, meskipun sebenarnya kerap kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Modal budaya meliputi kepemilikan, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, dan cara bergaul. Bourdieu membagi modal budaya menjadi tiga bentuk utama, pertama yaitu Modal Budaya Terwujud (*Embodied Cultural Capital*) yang terinternalisasi dalam diri individu sebagai disposisi yang bertahan lama. Contohnya meliputi pengetahuan, keterampilan, cara bertutur kata, dan cara berpenampilan yang diakui dan dihargai dalam suatu ranah sosial. Kedua, Modal Budaya Terobjektivasi (*Objectified Cultural Capital*) yang merujuk pada barang-barang material yang memiliki nilai budaya dan dapat diwariskan atau dipertukarkan, seperti buku, karya seni, atau alat musik. Ketiga, Modal Budaya Terinstitusionalisasi (*Institutionalized Cultural Capital*) bentuk ini dilegitimasi secara formal oleh institusi, seperti gelar pendidikan, atau keanggotaan dalam asosiasi ilmiah bergengsi. Kapital simbolik pendidik, seperti gelar pendidikan dan penguasaan intelektual, merupakan bentuk kapital simbolik yang telah dilegitimasi dan merupakan bagian dari kapital budaya yang terinstitusionalisasi.

Dalam perspektif Bourdieu, praktik-praktik tersebut mereproduksi ketimpangan melalui bahasa dan interaksi sehari-hari sebagai alat dominasi simbolik. Misalnya, ketika 40% siswa mengakui bahwa guru cenderung memihak siswa berprestasi atau berlatar belakang ekonomi tinggi, hal ini mencerminkan bagaimana modal budaya (seperti prestasi akademik atau kekayaan ekonomi) dijadikan alat legitimasi untuk memperkuat struktur kekuasaan. Siswa dengan modal budaya rendah kemudian menginternalisasi posisi "*inferior*" mereka sebagai sesuatu yang wajar (*doxa*), seperti diungkapkan Bourdieu melalui konsep habitus. Namun, data juga mengungkap

potensi transformatif modal budaya dan sosial.

Sebanyak 32% siswa menekankan pentingnya solidaritas teman sebaya dan lingkungan inklusif sebagai solusi, sementara 24% mengusulkan edukasi keberagaman melalui kegiatan seperti diskusi atau pentas seni. Di sinilah modal budaya bisa dialihfungsikan dari alat dominasi menjadi instrumen emansipasi. Program sekolah seperti P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) dan "Roots" berpeluang menjadi ruang redistribusi pengetahuan kritis, di mana siswa belajar mendekonstruksi simbol-simbol diskriminatif dan membangun habitus baru yang inklusif.

Tantangan utama terletak pada peran guru dan kebijakan sekolah. Sebanyak 48% siswa mengaku tidak nyaman melapor ke guru/BK saat mengalami kekerasan simbolik, dan 36% menyatakan sekolah mereka belum memiliki program antibullying yang jelas. Kebijakan yang hanya mengandalkan hukuman (disebut 28% responden) tanpa membangun kesadaran kritis justru mengukuhkan struktur koersif. Padahal, menurut Bourdieu, guru seharusnya bertransformasi dari agen reproduksi menjadi agen perubahan dengan melatih siswa mengidentifikasi bias kultural dalam interaksi sehari-hari.

Kearifan lokal Sunda seperti prinsip "*silih asah, silih asuh*" (saling mempertajam pikiran, saling mengasuh perasaan) ke dalam praktik pedagogis dapat mentransformasi modal budaya menjadi alat inklusi, sebagaimana yang diharapkan dari sekolah seharusnya menjadi lembaga inklusif (Martono, 2019, hlm. 150). Hal ini tentu secara implisit muncul dalam respons siswa, menjadi modal budaya tandingan (*counter-habitus*) untuk melawan dominasi simbolik.

Kabupaten Bandung dengan kekayaan budaya Sunda dapat menjadi ruang ideal untuk menguji implikasi potensi ini. Merevitalisasi nilai-nilai ini ke dalam sebuah kegiatan kolaboratif seperti, projek seni berbasis budaya Sunda dapat mendorong dekonstruksi hierarki. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang setara, diperlukan restrukturisasi medan pendidikan. Kebijakan harus bergeser dari pendekatan represif (hukuman) ke sanksi edukatif-

restoratif, seperti meminta pelaku merefleksikan dampak ucapan diskriminatif dan terlibat dalam dialog dengan korban. Keberhasilan intervensi ini diukur tidak hanya dari penurunan angka kekerasan simbolik, tetapi juga peningkatan partisipasi siswa marginal dalam kegiatan sekolah. Pendekatan ini tidak hanya meminimalisir kekerasan simbolik, tetapi juga menggeser peran guru dari "penguasa" menjadi "fasilitator" yang memberdayakan habitus siswa.

Kekerasan simbolik di SMP Kabupaten Bandung menjadi cermin reproduksi ketimpangan modal sosial dan modal budaya. Pemanfaatan modal sosial secara positif dapat menjadi kekuatan penangkal kekerasan simbolik. Hal ini tentu melibatkan upaya "membangun hubungan sosial yang baik" antara pendidik, peserta didik, dan orang tua, yang menciptakan kenyamanan, kepercayaan, dan keterbukaan dalam setiap aktivitas pendidikan. Modal budaya juga dapat berfungsi sebagai alat eksklusi dan inklusi, secara sistemik, pengembangan modal budaya yang inklusif berarti menciptakan pendidikan yang seimbang dan tidak bias, di mana habitus dari berbagai kelas sosial (atas dan bawah) direpresentasikan secara proporsional. Sehingga terjadi pemahaman, bahwa kekerasan simbolik dilanggengkan tidak hanya melalui interaksi individu tetapi juga secara struktural dalam sistem pendidikan.

Struktur dasar sekolah, termasuk norma-norma yang tidak terucapkan, nilai-nilai, dan pelajaran implisit itu dapat memberlakukan norma-norma budaya yang dominan dan meminggirkan siswa yang modal budayanya berbeda, bahkan tanpa niat eksplisit. Oleh karena itu, mengatasi kekerasan simbolik memerlukan pemeriksaan kritis terhadap seluruh lingkungan sekolah, melampaui perilaku yang jelas untuk meneliti norma-norma yang tidak terucapkan, nilai-nilai, dan asumsi pedagogis yang tertanam dalam kurikulum tersembunyi.

Pendidik harus mengadopsi peran sebagai pembimbing dan konselor, bukan penguasa; menggunakan komunikasi yang ramah dan memotivasi, menghindari sikap mencari kesalahan, serta melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan dan menanamkan nilai-nilai positif seperti

empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Kemudian, sekolah harus mendorong pengembangan modal sosial melalui peningkatan hubungan baik antar seluruh pemangku kepentingan (pendidik, siswa, orang tua) dan partisipasi aktif komunitas.

Selanjutnya dengan pengembangan kurikulum yang seimbang dan tidak bias, yang merepresentasikan habitus dari berbagai lapisan masyarakat yang akan meminimalkan ideologi materialistik dalam media pembelajaran, memberikan kebebasan bagi siswa untuk berbagi pengalaman beragam, serta mengadopsi kurikulum berbasis komunitas yang mempertimbangkan potensi dan kondisi lokal. Ini membutuhkan reformasi yang komprehensif, pelatihan guru yang ditargetkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis, dan evaluasi ulang mendasar terhadap budaya sekolah untuk memastikan bahwa sekolah benar-benar inklusif dan adil.

Kekerasan simbolik di SMP Kabupaten Bandung bersifat sistemik dan terlokalisasi dalam habitus pendidikan. Peran modal sosial dan modal budaya menjadi upaya meminimalisir kekerasan simbolik dengan rekonstruksi keseluruhan ekosistem sekolah, dengan memanfaatkan kapital lokal sebagai kekuatan penangkal. Dengan memperkuat hubungan sosial, menumbuhkan kepercayaan, dan mengembangkan modal budaya yang inklusif serta menghargai keberagaman, lingkungan sekolah dapat bertransformasi menjadi ruang yang lebih egaliter dan memberdayakan. Upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan, didukung oleh pemahaman mendalam tentang dinamika kapital, sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang bebas dari dominasi dan kekerasan simbolik.

PENUTUP

Kekerasan simbolik dalam lingkungan pendidikan, khususnya di SMP Kabupaten Bandung, merupakan fenomena laten yang berakar kuat pada ketimpangan modal sosial dan modal budaya. Kekerasan ini bukan sekadar insiden sporadis, melainkan sebuah manifestasi dari relasi kuasa yang timpang, di mana pandangan dominan dilegitimasi dan diterima secara tidak sadar oleh para pihak

yang terlibat. Oleh karena itu, dekonstruksi kekerasan simbolik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukuman saja, tetapi juga harus menyasar pada restrukturisasi fundamental dalam sistem pendidikan. Implementasi strategi berbasis revitalisasi modal sosial melalui penguatan norma kooperatif, jaringan kolaborasi, dan solidaritas terbukti telah menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang setara.

Optimalisasi modal budaya yang inklusif dapat melawan reproduksi ketimpangan dengan memastikan bahwa habitus dari berbagai latar belakang sosial-budaya terwakili dan dihargai. Dengan menggeser peran pendidik dari penguasa menjadi fasilitator dan menerapkan sanksi edukatif-restoratif, sekolah dapat menumbuhkan empati dan kesadaran kritis. Keberhasilan intervensi ini tidak hanya diukur dari penurunan kasus kekerasan simbolik, tetapi juga dari peningkatan partisipasi dan pemberdayaan siswa yang menjadi korban, yang pada akhirnya akan merealisasikan tujuan esensial pendidikan: mem manusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1986). *The Forms Of Capital* (pp. 15–29). Greenwood Press.
- Caswita. (2019). Kurikulum Tersembunyi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 17(3), 300–314. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Darmaningtyas, & Subkhan, E. (2012). *Manipulasi Kebijakan Pendidikan* (1st ed.). Resist Book.
- James p. Spradley. (2006). *Metode Etnografi* (2nd ed.). Tiara Wacana.
- Krisbiyantoro, J., & Lestari, P. (2008). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan. *Forum Ilmu Sosial*, 35(1), 10–18.
- Mahrus, M. (2021). Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran dalam Sistem Pendidikan Nasional. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), 41–80. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.59>
- Mangera, E., & Simega, B. (2017). Eufemisasi Sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Pembelajaran Di Smk Kristen Makale Tana Toraja. 2(2), 208–217. www.jurnal.unismuh.ac.id/perspektif
- Martono, N. (2019). Sekolah Inklusi Sebagai Arena Kekerasan Simbolik. *Sosiohumaniora*, 21(2).

- <https://doi.org/10.24198/sosiohumanior.a.v21i2.18557>
- Mohulaingo, R., Pomalingo, S., Halidu, S., Cuga, C., Guru, P., & Dasar, S. (2025). Mengurai Kekerasan Simbolik Dibalik Seragam Sekolah Di Sekolah Dasar : (Pandangan Pierre Bourdieu Tentang Habitus Dalam Pendidikan). 2(3), 1474–1487. <https://doi.org/10.62335>
- Reresi, M., Rahawarin, B. A., & Ngoranubun, W. (2023). Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8(2), 156–167. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8177>
- Retnosari, P. (2019). Kekerasan Simbolik Pada Sistem Pendidikan Sekolah Negeri Di Indonesia. *JURNAL WIDYALOKA IKIP WIDYA DARMA*, 6(3).
- Rosaliza, M., Asriwandari, H., & Indrawati. (2023). Field Work: Etnografi Dan Etnografi Digital. *Jurnal Ilmu Budaya*, 20(1), 74–103.
- Sa'diyah, H. (2021). Kekerasan dalam Pendidikan; Sejarah, Perkembangan dan Solusi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 70–86. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.1.1.70-86>
- Selfiana, O, Ridwan, M., & Ahmad, S. (2023). KEKERASAN SIMBOLIK DI UPT SMAN 4 SINJAI. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 3(1), 115–126.
- Siswadi, G. A. (2022). RELASI PENDIDIK DENGAN PESERTA DIDIK DALAM PANDANGAN PAULO FREIRE (1921-1997) (Suatu Telaah Filosofis Sebagai Upaya Menghindari Praktik Kekerasan Simbolik dalam Dunia Pendidikan). *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 3(1), 86–100. <https://doi.org/10.25078/sa.v3i1.2160>
- Ulfah. (2013). Eufemisasi Sebagai Mekanisme Kekerasan Simbolik Dalam Pembelajaran Di Sekolah. *Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Seni*, 16(3).
- Wibowo, P., & Chasif Ascha, M. (2023). Violence Prevention Efforts In The Educational Environment: Socialization At Ibnu Sholeh Boarding School Bangkalan Madura. *Journal of Community Service*, 2, 357–364. <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>